BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan¹. Kepemimpinan dapat pula di definisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.² Sedangkan menurut Stephen P. Robbins “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan”.³

Kepemimpinan dalam konsep al-Qur’an disebutkan dengan istilah Imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur’an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.

¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990),h.684

² Rivai, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003),h. 3

³ Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior*, (Prentice-Hall, 1983),h 112

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “*amir*” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam⁴

2. Azas-Azas Kepemimpinan

a. Kemanusiaan

Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya setiap individu, demi tujuan-tujuan human.

b. Efisien

Efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber sumber, materi dan jumlah manusia; atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern.

c. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi⁵

Teori kepemimpinan juga membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak lagi

⁴ Maimunah. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya, dalam Jurnal AlAfkar Universitas Islam Indigari*, Vol. V, No. 1, 2017.

⁵ Kartini Kartono.... h. 94

dipahami secara organik tetapi merupakan dimensi organisasi yang mempunyai kontribusi untuk membangun budaya organisasi yang sehat.⁶

3. Teori Kepemimpinan Dalam Islam

Pada dasarnya, teori kompetensi kepemimpinan memiliki tiga macam yaitu: (a) teori sifat, (b) teori perilaku, dan (c) teori lingkungan. Ketiga teori kepemimpinan ini merupakan *grand theory* kepemimpinan. Ketiga teori tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Teori Sifat

Teori sifat disebut juga teori genetik, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan.

Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasi berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan intelegensi (kecenderungan) yang esensial bagi kepemimpinan

⁶ Rasminto, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Berwawasan Visioner-Transformatif Dalam Otonomi Pendidikan*, (Malang: Jurnal el-Harakah,2003), h.17

yang efektif, yang merupakan kualitas bawaan seseorang.⁷

b. Teori Perilaku

Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi dan memotivasi bawahan. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman⁸

c. Teori lingkungan

Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat dan keadaan. Kepemimpinan dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap

⁷ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif* (Depok: PT. RajagrafindoPersada, 2016), 116

⁸ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif* (Depok: PT. RajagrafindoPersada, 2016), 116

situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula.

4. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan

- a. Jujur (Amanah)
- b. Adil
- c. Musyawarah (Syura)
- d. Etika Tauhid dan Amr Ma'ruf Nahi Munkar.⁹

B. Kepala Negara

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan, sebagai seorang kepala Negara. Sistem presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Para menteri tidak bertanggungjawab kepada badan Legislatif, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan Legislatif.¹⁰

Kepala Negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar, Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala Negara (*Head Of State*)

⁹ Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, .(2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Ribhka Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia" , Vol. 4, No. 2, Oktober 2018. H. 249

ataupun Kepala pemerintahan (*head Of Government*) atau *Chief executive*.¹¹

Adapun ciri-ciri dan prinsip-prinsip dalam sistem Presidensial menurut Mahfud MD sebagai berikut:

Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif), Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.¹²

Dalam Islam, negara atau khilafah memiliki kedudukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan, khilafah merupakan pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akherat. Karena semua persoalan keduniaan, menurut pandangan agama, bermuara kepada kepentingan akherat. Pada hakikatnya pemegang khilafah (kepala negara) adalah sebagai pengganti Rasul dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Berdasarkan pandangan tersebut tujuan negara dalam Islam meliputi dua tujuan utama, yang secara langsung juga merupakan tanggung jawab kepala negara dalam merealisasikannya, kedua tujuan tersebut adalah: Pertama, melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut, agar seluruh manusia

¹¹ Fajurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019)

¹² Wira Atma Hajri, *Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan*, h. 11.

dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah; dan Kedua, memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kedhaliman. yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kedhaliman.¹³

a. Landasan Kepala Negara Menurut Ketentuan Hukum Syara

Sebelum berangkat lebih jauh mengenai kepala negara, al-Qur'an telah memberikan konsep pemerintahan dengan baik, yang meliputi prinsip keadilan, musyawarah dan ketaatan kepada ulil amri. Sehingga para ulama menggariskan prinsip tersebut dapat terwujud bila dijalankan oleh individu manusia. Maka dari itu Islam menjelaskan indikasinya terhadap individu manusia tersebut, sebagai pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, dasar yuridis terhadap pemimpin dalam Islam dapat ditemukan dalam instrumen hukum dalil syar'i dan ijma¹⁴

b. Urgensi Pengangkatan Kepala Negara Menurut Ketentuan Islam

Sebagaimana telah di utarakan di atas mengenai dasar kepala negara dalam Islam, semua itu tidak

¹³ Muhammad Yusuf Musa, Nizam *al-Hukm*. hlm. 168.

¹⁴ Abu Yahya, *Imarah Islam Indonesia, Menyatukan Visi dan Misi Kaum Mulimin Indonesia Menuju Penegakan Syari'at Islam Secara Kaffah*, cet.1, (Jakarta: Ijarah Prees, 2012), hlm. 15.

terlepas dari pantauan keharusan umat. Maka berbicara masalah kepala negara, tidak terlepas dari hubungan rakyat dengan penguasa, karena jabatan tersebut ialah hak segala manusia, akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan politik yang diistilahkan oleh *Aristoteles zoon politicom*, atau dalam bahasa *Ibn Khadun, al-insan madaniyyun bi al-thab'i*.

Maka sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri, dengan beraneka ragam kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga hal tersebut akan menuntutnya untuk menjalinkan hubungan solidaritas dalam hidup kelompok masyarakat. Tetapi kelompok tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pemicu konflik sosial. Maka dari itu manusia perlu menempuh kebijakan supaya ada penengah serta pelindung untuk mereka, sehingga keharusan keberadaan seorang pemimpin atau kepala negara untuk menjalankan amanah tersebut.

c. Kedudukan Kepala Negara dalam UUD Tahun 1945

Negara Indonesia menganut sistem republik sesuai dengan (pasal 1 ayat (1) UUD 1945), dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan (government). Serta Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar, dan Presiden menetapkan

peraturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, akan tetapi Presiden dalam menjalankan pemerintahan itu di batasi oleh UUD 1945. Kemudian lembaga pemerintahan di Indonesia dibagi tiga lembaga, yaitu eksekutif (Presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan yudikatif (Mahkamah Agung), yang berwenang berdasarkan konstitusi negara.¹⁵

Sebelum amandemen UUD 1945 kedudukan kepala negara di Indonesia sangat berwenang terhadap lembaga pemerintahan lain, dan kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan parlemen, sehingga kedudukannya kepala negara merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan.¹⁶ Maka dengan amandemen pertama tahun 1999 sudah membawa perubahan atas lembaga kepresidenan.

¹⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi...*, hlm. 77

¹⁶ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945, cet. 1*, (Yogyakarta: UI Press, 2003), hlm. 84.